

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Anshori. *Pemenuhan Aksesibilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusi Ramah Disabilitas*, Skripsi, Pembimbing I: Dra. Nadiyah, M.H., Pembimbing II: Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pemenuhan, Aksesibilitas Publik, Penyandang Disabilitas, Kota Inklusi

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin yang dilatarbelakangi dengan peluncuran Road Map Kota Inklusi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dengan komitmen menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota inklusi dan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki road map kota inklusi. Selain itu, sebelum menggagas sebagai kota inklusi, pada 2013, Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian ialah pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin dan pengurus Yayasan Pensil Waja Benua Kota Banjarmasin dan objek penelitian ialah mengetahui pemenuhan hak aksesibilitas dan dampak serta kendala yang dirasakan penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas publik yang ada di Kota Banjarmasin. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara serta studi pustaka melalui proses pengumpulan data dan menganalisis data tersebut dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai kota inklusi rumah disabilitas masih belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari fasilitas aksesibilitas yang belum memadai, seperti pemasangan *guiding block* yang tidak sesuai dengan prosedur, fungsi pembangunan fasilitas aksesibilitas tidak maksimal, hingga kurang maksimalnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan fasilitas aksesibilitas. Adapun dampak dan kendala bagi penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas publik di Kota Banjarmasin ialah dengan tidak maksimalnya fasilitas aksesibilitas, maka berdampak kepada penyandang disabilitas sehingga menimbulkan kendala tersendiri, yaitu kurang produktif dalam beraktivitas. Sehingga penyematan julukan Kota Ramah Disabilitas untuk Kota Banjarmasin masih belum layak.